

ANALISIS PENGUATAN PERAN KELEMBAGAAN TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMERATAAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Lady Vironica Janiar¹, Aris Soelistyo²

Abstract: *This study aims to determine how the role of institutions (government and banking) and the influence of the Provincial Minimum Wage, Rural Banks and Non-Performing Loan on poverty and income inequality in Indonesia in 2015-2016. This study uses panel data regression approach for 33 provinces in Indonesia during the 2015-2016 period. The result show that institutional role (government and banking) plays a strong role in poverty in 21 provinces and plays a weak role in 12 provinces, and plays a strong role in income inequality in 12 provinces and plays a weak role in 21 provinces. The result of the t test showed that the provincial minimum wage and rural banks a significant negative effect on poverty, and variable non-performing loan a not significant positive effect on poverty. While variable rural banks and non-performing loan a significant negative effect on income inequality, in addition to the provincial minimum wage positive and significant effect on income inequality. The result of the F test variable the minimum wage, rural banks, and non-performing loan together effect on poverty and income inequality. When viewed from the estimation results can be seen that the R-squared value of 0,99 or 99% (Y1) and 0,98 or 98% (Y2). This means that 99% of poverty and 98% of income inequality in Indonesia is influenced by the provincial minimum wage (X1), rural banks (X2) and non-performing loan (X3). The remaining 0,01 or 1% and 0,02 or 2% is explained by other variables outside the model.*

Keywords: *Poverty, Income Inequality, Provincial Minimum Wage, Rural Banks, Non Performing Loan*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kelembagaan (pemerintah dan perbankan) serta pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Non Performing Loan (NPL) terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2015-2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel 33 provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2016. Hasil menunjukkan bahwa peran kelembagaan (pemerintah dan perbankan) berperan kuat terhadap kemiskinan di 21 provinsi dan berperan lemah di 12 provinsi di Indonesia, serta berperan kuat terhadap ketimpangan pendapatan di 12 provinsi dan berperan lemah di 21 provinsi di Indonesia. Hasil uji t menunjukkan bahwa UMP dan BPR berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, dan NPL berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan BPR dan NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dan UMP berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil uji F variabel UMP, BPR dan NPL secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Bila dilihat dari hasil estimasi dapat diketahui bahwa nilai R-squared sebesar 0,99 atau 99% (Y1) dan 0,98 atau 98% (Y2). Artinya 99% kemiskinan dan 98% ketimpangan pendapatan di Indonesia dipengaruhi oleh variabel UMP (X1), BPR (X2) dan NPL (X3). Sisanya 0,01 atau 1% dan 0,02 atau 2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Kata Kunci: Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Upah Minimum Provinsi, Bank Perkreditan Rakyat, Non Performing Loan

Pendahuluan

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan menjadi persoalan ekonomi paling mendasar yang selalu menjadi pusat perhatian karena sulit terpecahkan hampir di setiap negara yang sedang berkembang. Indonesia termasuk salah satu negara sedang berkembang yang ditandai dengan tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di sebagian besar masyarakatnya (Susilowati, Sri, & Suliswanto, 2015). Setiap tahun jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan di Indonesia cenderung mengalami fluktuasi. Sebagian besar permasalahan penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan di Indonesia disebabkan karena kurangnya pendapatan yang diterima dalam memenuhi kebutuhan hidup. Besarnya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

¹ [Universitas Muhammadiyah Malang_Malang] Email: [ladyvironica@gmail.com]

² [Universitas Muhammadiyah Malang_Malang] Email: [arissoelistyo65@gmail.com]

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin dan Gini Ratio di Indonesia Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Gini Ratio (%)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kontribusi Kemiskinan (%)
2012	28594700	0,413	245416200	11,65
2013	28553930	0,406	248818100	11,47
2014	27727780	0,414	252164800	11,00
2015	28513570	0,402	255461700	11,16
2016	27764320	0,394	258705000	10,73

Sumber: BPS Indonesia diolah, 2017

Kemiskinan dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi standar hidup minimum atau di bawah garis kemiskinan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung akan berpengaruh terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin (Sri & Suliswanto, 2010). Sedangkan ketimpangan pendapatan merupakan hasil pertumbuhan atau pembangunan yang belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan atau berbagai golongan penduduk seluruh daerah (Nuraini, 2009). Ketimpangan dan kemiskinan yang tinggi dapat berakibat buruk bagi kehidupan sosial, dan dapat menjadi penyebab konflik. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, namun angka tersebut masih jauh dari kata baik karena kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini selalu terjadi karena pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu berlangsung sistemik. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan lambat, sehingga daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama karena kondisi disetiap daerah juga berbeda (Arifin, 2009).

Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pun kini merupakan masalah pokok dalam pembangunan dan menjadi sasaran utama kebijakan pembangunan di banyak negara, salah satunya Indonesia. Melihat tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan tersebut menyebabkan sangat diperlukannya penanganan yang serius. Peran kelembagaan disini sangat diperlukan baik dari kelembagaan pemerintah maupun kelembagaan non pemerintah.

Peran penting kelembagaan dalam ekonomi adalah sebagai sarana untuk menurunkan ketidakpastian atau mengubahnya menjadi resiko. Turunnya ketidakpastian membuat biaya transaksi menjadi lebih rendah, sehingga transaksi pasar atau perdagangan akan meningkat. Sebagaimana telah dipahami bersama bahwa perdagangan memberikan keuntungan bagi pelakunya, karena memungkinkan mereka untuk spesialisasi. Spesialisasi akan meningkatkan

produktivitas, dan pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran masyarakat dan aktivitas ekonomi. Peran lembaga terhadap perekonomian tersebut terkait dengan kondisi pasar yang ada. Jika kondisi pasar sudah terbuka dan terintegrasi, maka peran kelembagaan dalam mendorong perekonomian menjadi lebih besar. Jadi perlu diperhatikan mengenai pembangunan lembaga yang dapat mendukung berkembangnya pasar. Douglas C. North mendefinisikan lembaga sebagai “*Institutions are the humanly devised constraints that structure political, economic, and social interaction. They consist of both informal constraint, and formal rules*”. Sedangkan Bank Dunia mendefinisikan lembaga sebagai aturan, mekanisme penegakan dan organisasi (Azansyah, 2013). Salah satu peran lembaga pemerintah yaitu dengan menetapkan kebijakan upah minimum untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Pada pasar tenaga kerja besarnya upah minimum yang harus dibayarkan perusahaan kepada tenaga kerjanya sangatlah penting. Upah minimum merupakan suatu standar minimum dalam memberikan sejumlah upah yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri yang diperuntukkan kepada para pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya. Permintaan akan barang dan jasa tidak mampu terpenuhi apabila tenaga kerja tidak mendapatkan upah yang cukup. Oleh sebab itu perlunya pemerintah dalam mengatur besarnya upah minimum yang harus diberikan perusahaan kepada tenaga kerjanya guna memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang ada. Sehingga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dapat dikurangi dengan terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa. Selain penanganan oleh lembaga pemerintah, peran lembaga non pemerintah seperti lembaga perbankan juga diharapkan dapat berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan melalui penguatan sektor perbankan.

Peran lembaga perbankan lebih difokuskan bagaimana cara memberantas kemiskinan dan pemerataan pendapatan dengan memberikan kredit kepada lapangan usaha kecil yang terdapat di Indonesia. Usaha kecil yang terdapat di Indonesia identik dengan masyarakat miskin yang kekurangan modal sehingga usaha kecilnya sendiri kurang dapat berjalan dan tumbuh dengan baik (Fuddin, 2011). Lembaga keuangan perbankan yang memberikan jasa pelayanan terutama pada usaha mikro dan kecil dan letaknya dekat dengan masyarakat di pedesaan yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Lembaga keuangan ini sangat tepat dan strategis untuk melayani jasa perbankan yakni kredit untuk mendukung usaha kecil dalam menyokong ekonomi masyarakat dan sudah diakui memiliki peran dalam perekonomian di Indonesia. Penguatan dalam sektor perbankan untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan adalah dalam bentuk pemerintah memperbanyak cabang-cabang Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) di daerah-daerah untuk membantu masyarakat ekonomi lemah. Dengan banyaknya cabang-cabang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini akan meningkatkan kesempatan masyarakat untuk melakukan kredit terutama sebagai modal usaha mikro dan kecil. Sehingga perekonomian masyarakat tetap dapat bertahan, dari berjalannya usaha masyarakat yang meningkat maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat dapat terbebas dari kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Berkaitan dengan pemberian kredit secara besar-besaran juga dapat menimbulkan dampak terjadinya resiko kredit dan resiko sistematis yang sangat penting untuk diperhatikan. Pengukuran resiko yang berkaitan dengan pemberian kredit yaitu *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah. Apabila pengembalian dana kredit mengalami kemacetan atau tidak lancar maka akan menyebabkan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Dalam hal ini perlunya di perhatikan bahwa dengan meningkatnya kredit yang diberikan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya *Non Performing Loan* (NPL) yang akan berakibat pada kerugian bank. Sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat peminjaman kredit kepada masyarakat terutama ekonomi lemah dan menyebabkan ketidakmerataan pendapatan. Oleh sebab itu, dalam mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia perlunya penguatan peran kelembagaan yakni lembaga pemerintah dan lembaga perbankan untuk membantu masyarakat agar lebih sejahtera.

Penelitian yang dilakukan oleh (Riva, 2014) tentang pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat upah minimum provinsi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda time series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPT berpengaruh positif dan tidak signifikan. Sedangkan UMP berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2002-2011.

Penelitian (Sungkar, Nasir, & Nazamuddin, 2015) yang meneliti tentang pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda time series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 1999-2013.

Penelitian (Suhartini, A. M. A., & Yuta, 2012) yang meneliti tentang keterkaitan lembaga keuangan mikro (LKM), usaha mikro dan kecil (UMK) serta kemiskinan di Indonesia tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BPR dan UMK dapat membantu

pengentasan kemiskinan. Pengaruh keberadaan BPR terhadap kemiskinan lebih kuat jika bekerja melalui keberadaan UMK.

Penelitian (Pamungkas, Rugemintwari, Tarazi, & Trinugroho, 2016) yang meneliti tentang bank lending and income inequality: evidence from Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatkan pinjaman kepada UMKM dapat berkontribusi secara signifikan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu terdapat pada jenis variabel yang digunakan. Penelitian ini menggunakan variabel jumlah penduduk miskin, gini ratio, Upah Minimum Provinsi (UMP), jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan jumlah *Non Performing Loan* (NPL). Perbedaan lainnya terdapat pada teknik analisa yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan data panel untuk 33 provinsi di Indonesia tahun 2015-2016.

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kelembagaan (pemerintah dan perbankan) terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2015-2016. Serta, bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2015-2016.

Metode Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data jumlah penduduk miskin, gini ratio, Upah Minimum Provinsi (UMP), jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan jumlah *Non Performing Loan* (NPL). Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk menjawab permasalahan terkait kemiskinan dan ketimpangan pendapatan melalui penguatan peran kelembagaan, maka menggunakan pendekatan regresi data panel 33 provinsi di Indonesia selama tahun 2015 – 2016.

Berikut model persamaan regresi linier berganda data panel dalam penelitian ini:

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots (2)$$

Dimana :

- Y_1 = Kemiskinan (Jumlah Penduduk Miskin)

- Y_2 = Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)
- β_0 = Konstanta
- $\beta_{1,2,3}$ = Koefisien regresi dari variabel independen
- X_1 = Upah Minimum Provinsi (UMP)
- X_2 = Jumlah Kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
- X_3 = Jumlah *Non Performing Loan* (NPL)
- e = *Term of error*

Pengujian model dilakukan menggunakan uji panel data yaitu dengan model *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Selanjutnya pemilihan model terbaik menggunakan Uji LM, Uji Chow dan Uji Hausman. Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan dengan uji-t (uji parsial), uji-F (uji simultan) dan koefisien determinasi (*Adjusted R-square*).

Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui peran kelembagaan (pemerintah dan perbankan) terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pada seluruh provinsi di Indonesia dengan menggunakan gambaran perkembangan semua variabel antar provinsi dan antar tahun. Peran kelembagaan pemerintah melalui penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) berperan kuat terhadap kemiskinan di 21 provinsi dan berperan lemah di 12 provinsi di Indonesia serta berperan kuat terhadap ketimpangan pendapatan di 12 provinsi dan berperan lemah di 21 provinsi di Indonesia pada kurun waktu 2015-2016. Demikian pula peran kelembagaan perbankan melalui jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan jumlah *Non Performing Loan* (NPL) yang berperan kuat terhadap kemiskinan di 21 provinsi dan berperan lemah di 12 provinsi di Indonesia. Hal ini juga terjadi pada ketimpangan pendapatan yang berperan kuat di 12 provinsi dan berperan lemah di 21 provinsi di Indonesia pada kurun waktu 2015-2016.

Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan jumlah *Non Performing Loan* (NPL) terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia menggunakan analisis linier berganda pada Eviews 9. Data yang digunakan merupakan panel data dengan observasi 2 tahun 2015-2016 yang terdiri dari 33 Provinsi di Indonesia. Berdasarkan pengujian model, model *fixed effect* merupakan yang paling baik digunakan dalam penelitian ini. Hasil output regresi panel data dengan metode *fixed effect* sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Regresi Fixed Effect (Y_1)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1104360.	43193.00	2.556.803	0.0000
X1	-0.116618	0.028992	-4.022.440	0.0004
X2	-3.527.788	1.277.704	-2.761.038	0.0097
X3	1.29E-07	1.65E-07	0.785222	0.4385

Sumber: Data diolah Eviews9, 2017

Tabel 3. Hasil Regresi Fixed Effect (Y_2)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.368270	0.006582	5.594.825	0.0000
X1	8.38E-09	3.32E-09	2.521.033	0.0172
X2	-7.51E-05	2.92E-05	-2.569.334	0.0154
X3	-6.78E-14	3.12E-14	-2.174.373	0.0377

Sumber: Data diolah Eviews9, 2017

Berdasarkan hasil uji Tabel 2 dan Tabel 3 maka di peroleh hasil estimasi persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_1 = 1104360 - 0,116618X_1 - 352,7788X_2 + 1,29E-07X_3 \dots\dots\dots (3)$$

$$Y_2 = 0,368270 + 8,38E-09X_1 - 7,51E-05X_2 - 6,78E-14X_3 \dots\dots\dots (4)$$

Berdasarkan hasil estimasi data Tabel 2 maka terdapat nilai konstanta Y_1 adalah 1104360. Tabel 3 menunjukkan nilai konstanta Y_2 adalah 0,368270. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sebesar konstanta ketika variabel upah minimum, BPR, dan NPL sebesar nol.

Berdasarkan analisis statistik pada variabel jumlah penduduk miskin (Y_1), dapat dilihat bahwa hasil t-hitung Upah Minimum Provinsi (X_1) adalah 4,022440, dimana nilai ini lebih besar dari pada nilai t-tabel pada $df = n-k = 66-3 = 63$ dan $\alpha = 0,10$ yaitu 1,66940. Sedangkan dilihat dari probabilitasnya, nilai probabilitas t-statistik adalah sebesar 0,0004 dimana nilai tersebut lebih kecil daripada derajat kesalahan $\alpha = 0,10$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan t-hitung, t-tabel dan probabilitas maka diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_1 , dan dapat dijelaskan bahwa variabel upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Hasil t-hitung Bank Perkreditan Rakyat (X_2) terhadap jumlah penduduk miskin (Y_1) adalah 2,761038, dimana nilai ini lebih besar dari pada nilai t-tabel pada $df = n-k = 66-3 = 63$ dan $\alpha = 0,10$ yaitu 1,66940. Sedangkan dilihat dari probabilitasnya, nilai probabilitas t-statistik adalah sebesar 0,0097 dimana nilai tersebut lebih kecil daripada derajat kesalahan α

= 0,10. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan t-hitung, t-tabel dan probabilitas maka diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_1 , dan dapat dijelaskan bahwa variabel jumlah bank perkreditan rakyat berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Hasil t-hitung *Non Performing Loan* (X_3) terhadap jumlah penduduk miskin (Y_1) adalah 0,785222, dimana nilai ini lebih kecil dari pada nilai t-tabel pada $df = n-k = 66-3 = 63$ dan $\alpha = 0,10$ yaitu 1,66940. Sedangkan dilihat dari probabilitasnya, nilai probabilitas t-statistik adalah sebesar 0,4385 dimana nilai tersebut lebih besar daripada derajat kesalahan $\alpha = 0,10$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan t-hitung, t-tabel dan probabilitas maka diputuskan untuk menerima H_0 dan menolak H_1 , dan dapat dijelaskan bahwa variabel *Non Performing Loan* (NPL) tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan analisis statistik pada variabel ketimpangan pendapatan (Y_2), dapat dilihat bahwa hasil t-hitung Upah Minimum Provinsi (X_1) adalah 2,521033, dimana nilai ini lebih besar dari pada nilai t-tabel pada $df = n-k = 66-3 = 63$ dan $\alpha = 0,10$ yaitu 1,66940. Sedangkan dilihat dari probabilitasnya, nilai probabilitas t-statistik adalah sebesar 0,0172 dimana nilai tersebut lebih kecil daripada derajat kesalahan $\alpha = 0,10$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan t-hitung, t-tabel dan probabilitas maka diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_1 , dan dapat dijelaskan bahwa variabel upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Hasil t-hitung Bank Perkreditan Rakyat (X_2) terhadap ketimpangan pendapatan (Y_2) adalah 2,569334, dimana nilai ini lebih besar dari pada nilai t-tabel pada $df = n-k = 66-3 = 63$ dan $\alpha = 0,10$ yaitu 1,66940. Sedangkan dilihat dari probabilitasnya, nilai probabilitas t-statistik adalah sebesar 0,0154 dimana nilai tersebut lebih kecil daripada derajat kesalahan $\alpha = 0,10$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan t-hitung, t-tabel dan probabilitas maka diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_1 , dan dapat dijelaskan bahwa variabel jumlah bank perkreditan rakyat berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Hasil t-hitung *Non Performing Loan* (X_3) terhadap ketimpangan pendapatan (Y_2) adalah 2,174373, dimana nilai ini lebih besar dari pada nilai t-tabel pada $df = n-k = 66-3 = 63$ dan $\alpha = 0,10$ yaitu 1,66940. Sedangkan dilihat dari probabilitasnya, nilai probabilitas t-statistik adalah sebesar 0,0377 dimana nilai tersebut lebih kecil daripada derajat kesalahan $\alpha = 0,10$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan t-hitung, t-tabel dan probabilitas maka diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_1 , dan dapat dijelaskan bahwa variabel *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi *Fixed Effect Model* menunjukkan nilai probabilitas F-statistik jumlah penduduk miskin (Y_1) sebesar 0,000000

dimana nilainya $< \alpha = 0,10$. Sedangkan nilai F-hitung sebesar 3503,960 dimana nilainya $> F$ -tabel 2,39. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi (UMP), jumlah Badan Perkreditan Rakyat (BPR), dan *Non Performing Loan* (NPL) memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi *Fixed Effect Model* menunjukkan nilai probabilitas F-statistik ketimpangan pendapatan (Y_2) sebesar 0,000000 dimana nilainya $< \alpha = 0,10$. Sedangkan nilai F-hitung sebesar 113,2158 dimana nilainya $> F$ -tabel 2,39. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi (UMP), jumlah Badan Perkreditan Rakyat (BPR), dan *Non Performing Loan* (NPL) memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi *Fixed Effect Model* menghasilkan nilai koefisien determinasi adjusted R^2 pada jumlah penduduk miskin (Y_1) sebesar 0,99 (99%). Artinya, bahwa sebanyak 99% variasi atau perubahan jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen yang ada, sedangkan sisanya 1% dijelaskan sebab yang lain diluar model yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan, nilai koefisien determinasi adjusted R^2 pada ketimpangan pendapatan (Y_2) sebesar 0,98 (98%). Artinya, bahwa sebanyak 98% variasi atau perubahan ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen yang ada, sedangkan sisanya 2% dijelaskan sebab yang lain diluar model yang ada dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis uji statistik pada jumlah penduduk miskin (Y_1), variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Artinya apabila Upah Minimum Provinsi (UMP) naik sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,116618 atau 11,6618%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) ini maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang diperoleh dari hasil bekerja. Semakin banyak pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga kesejahteraan meningkat dan terbebas dari kemiskinan. Hasil penelitian ini didukung oleh (Riva, 2014), (Kapelyuk, 2014) dan (Sudirman, 2017) bahwa upah minimum mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan hasil analisis uji statistik, variabel jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Artinya apabila jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) naik sebesar 1% maka jumlah

penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 352,7788 atau 35277,88%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Semakin tinggi jumlah BPR maka semakin tinggi pula kesempatan masyarakat dalam menggunakan jasa pelayanan kredit terutama pada usaha kecil dalam menyokong perekonomian. Sehingga masyarakat dapat terus mempertahankan ketahanan keuangannya dan terbebas dari kemiskinan. Penelitian ini didukung oleh (Suhartini, A. M. A., & Yuta, 2012) bahwa BPR memiliki pengaruh langsung terhadap penurunan kemiskinan. BPR sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memiliki keunggulan dengan fokus pelayanan pada usaha mikro/kecil, pelayanan yang lebih fleksibel, dan letaknya di pedesaan. Hal ini merupakan kelebihan tersendiri bagi masyarakat kecil dengan lebih mudahnya dalam menjangkau sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonominya, baik kegiatan konsumtif maupun produktif. Sehingga peningkatan BPR akan memiliki dampak positif dalam mengurangi kemiskinan, dimana dampak positif ini akan lebih besar lagi jika LKM bekerja melalui UMK. Dimana UMK sendiri merupakan bagian dari masyarakat miskin yang memiliki kemauan untuk keluar dari kondisi miskin dan memiliki kemampuan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Penelitian ini juga didukung oleh (Burgess, 2004) dan (Panagariya, 2006) bahwa perluasan cabang BPR berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di India.

Berdasarkan hasil analisis uji statistik, variabel *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Artinya apabila *Non Performing Loan* (NPL) naik sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 1,29E-08 atau 1,29E-06%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya *Non Performing Loan* (NPL) tidak berpengaruh pada jumlah penduduk miskin. Hal ini dikarenakan menurut (Ismail, 2011), *Non Performing Loan* (NPL) akan berakibat pada kerugian bank. Kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapatkan bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total dan laba yang diterima bank akan mengalami penurunan karena pendapatan bunga kredit menurun. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) memiliki hubungan yang erat dengan keadaan internal bank itu sendiri.

Berdasarkan hasil analisis uji statistik pada ketimpangan pendapatan (Y_2), variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Artinya apabila Upah Minimum Provinsi (UMP) naik sebesar 1%

maka ketimpangan pendapatan mengalami kenaikan sebesar $8,38E-09$ atau $8,38E-07\%$. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga didukung oleh (Sungkar et al., 2015) bahwa upah minimum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Ini berarti menggunakan upah minimum sebagai alat strategis untuk mengurangi ketimpangan pendapatan tidak berguna. Alih-alih mengurangi ketimpangan pendapatan, justru menjadi pemicu kenaikan indeks ketimpangan pendapatan yang berarti distribusi pendapatan menjadi lebih tidak merata. Situasi ini sebagai konsekuensi dari struktur tenaga kerja di Indonesia, dimana terutama yang bekerja disektor pertanian atau sektor informal tidak langsung dipengaruhi oleh kenaikan upah minimum.

Berdasarkan hasil analisis uji statistik, variabel jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Artinya apabila jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) naik sebesar 1% maka ketimpangan pendapatan mengalami penurunan sebesar $7,51E-05$ atau $7,51E-03\%$. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menyebabkan penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini didukung oleh fungsi dari BPR yaitu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama rakyat kecil pengusaha mikro didaerah pedesaan. Mensejahterakan rakyat dengan memberi bantuan permodalan berupa kredit kepada para petani, pedagang, pengrajin dan pengusaha kecil atau pengusaha mikro lainnya. Sehingga dapat menciptakan lapangan kerja mandiri serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan. Penelitian ini juga didukung oleh (Pamungkas et al., 2016) yang mengatakan bahwa pinjaman bank yang diberikan kepada UMKM berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan hasil analisis uji statistik, variabel *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Artinya apabila *Non Performing Loan* (NPL) naik sebesar 1% maka ketimpangan pendapatan mengalami penurunan sebesar $6,78E-14$ atau $6,78E-12\%$. Melihat nilai koefisien dari *Non Performing Loan* (NPL) yang sangat kecil, ini berarti bahwa *Non Performing Loan* (NPL) bisa dikatakan berhubungan lemah dengan ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan menurut (Ismail, 2011), *Non Performing Loan* (NPL) akan berakibat pada kerugian bank. Kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapatkan bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total dan laba yang diterima bank akan mengalami penurunan karena pendapatan bunga kredit menurun. Sehingga hal ini

menunjukkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) memiliki hubungan yang erat dengan keadaan internal bank itu sendiri.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka diambil kesimpulan bahwa peran kelembagaan (pemerintah dan perbankan) berperan kuat terhadap kemiskinan di 21 provinsi dan berperan lemah di 12 provinsi di Indonesia tahun 2015-2016. Pada ketimpangan pendapatan berperan kuat terhadap di 12 provinsi dan berperan lemah di 21 provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2016. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa UMP dan BPR berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, dan NPL berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan BPR dan NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dan UMP berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil uji F variabel UMP, BPR dan NPL secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Bila dilihat dari hasil estimasi dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,99 atau 99% (Y_1) dan 0,98 atau 98% (Y_2). Artinya, 99% kemiskinan dan 98% ketimpangan pendapatan di Indonesia dipengaruhi oleh variabel UMP (X_1), BPR (X_2) dan NPL (X_3). Sisanya 0,01 atau 1% dan 0,02 atau 2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah untuk pemerintah. Diharapkan agar kedepannya dilaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan pendapatan serta pemerataan hasil-hasil ekonomi keseluruhan golongan masyarakat. Selain itu, dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di masing-masing wilayah dengan mengandalkan potensi-potensi yang dimiliki agar kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2009). Kesenjangan Dan Konvergensi Ekonomi Antar Kabupaten Pada Empat Koridor Di Propinsi Jawa Timur. *Humanity*, IV(2), 154–164. Diambil dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/viewFile/821/3007>
- Azansyah. (2013). Peran Kelembagaan Dalam Perekonomian , Kondisi Pembangunan Kelembagaan Di Indonesia , Dan Membangun Lembaga Yang Efektif. *Peran Kelembagaan dalam perekonomian*, VII(2), 262–279.
- Burgess, R. (2004). Can Rural Banks Reduce Poverty? Evidence from the Indian Social Banking Experiment, 1–17.
- Fuddin, M. K. (2011). Kecukupan Modal Di Dua Dimensi Berbeda Melalui Model Apex Bpr

- Dan Grameen. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 243–265.
- Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (1 ed., hal. 294). Jakarta: Kencana.
- Kapelyuk, S. (2014). Impact of minimum wage on income distribution and poverty in Russia. *Working Paper*, 14(3), 1–38. Diambil dari https://www.eerc.kiev.ua/default/download/creater/working_papers/file/c3683c36cca3ed44a46d046e446c49930e5a3dbd.pdf
- Nuraini, I. (2009). Potensi dan Ketimpangan Ekonomi Antar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan. *Media Trend*, 4(1), 21–44.
- Pamungkas, P., Rugemintwari, C., Tarazi, A., & Trinugroho, I. (2016). Bank Lending and Income Inequality : Evidence from Indonesia. *SSRN Working Paper*, 1–10.
- Panagariya, A. (2006). Bank Branch Expansion and Poverty Reduction: A Comment. *Economy, Indian Political*, 1–12.
- Riva, V. (2014). Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau. *JOM FEKON*, 1(2), 1–15.
- Sri, M., & Suliswanto, W. (2010). Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 354–366.
- Sudirman, L. A. (2017). PENGARUH UPAH MINIMUM DAN INFLASI TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI JAMBI. *jurnal of economics and business*, 1(1), 148–159.
- Suhartini, A. M. A., & Yuta, R. (2012). Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2), 137–144. Diambil dari ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/16439
- Sungkar, S. N., Nasir, M., & Nazamuddin. (2015). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnai Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(2), 14.
- Susilowati, D., Sri, M., & Suliswanto, W. (2015). Manusia , Utang Luar Negeri Dan Kemiskinan (Kajian Teoritis Di Indonesia). *Ekonomika-Bisnis*, 6(1), 89–106.